KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak ada tarif baru: angkutan kapal menjerit tuh
Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tak Ada Tarif Baru

Angkutan Kapal Menjerit Tuh

ANGGOTA Komisi V DPR Bambang Haryo Sukartono mengimbau pemerintah untuk segera menetapkan tarif angkutan penyeberangan yang sudah terkatung-katung selama 1,5 tahun. Penetapan tarif ini sangat penting bagi kelangsungan usaha angkutan penyeberangan yang saat ini sudah berada di ambang kritis.

"Tarif angkutan penyeberangan ini sudah 3 tahun tidak pernah disesuaikan padahal selama 1,5 tahun ini sudah dievaluasi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sekarang kembali terganjal di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan alasan belum ada data untuk dikaji. Padahal, pelimpahan kajian di Kemenko Marves (dari Kemenhub) sudah berlangsung lebih dari 3 bulan," kata Bambang, kemarin.

Bambang mengaku sudah bertemu langsung dengan pejabat di Kemenko Marves yang ditugaskan Menko Luhut Pandjaitan mengevaluasi tarif. Tapi sayang, pejabat yang bersangkutan ternyata tidak paham masalah angkutan kapal.

"Pajabat yang merupakan Staf Ahli Menko Marves itu mengaku tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan. Dia bilang masih menunggu data sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub," kata Haryo yang juga merupakan Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) ini.

Namun yang menjadi aneh, lanjut Bambang, belum adanya penyesuaian tarif ini lantaran Menko Marves tidak percaya dengan usulan tarif dari Menhub sehingga perlu dikaji lagi secara detail. Padahal selama ini, masalah tarif ini sudah dibahas sangat mendalam bersama Gapasdap selama 1,5 tahun ini. "Kemenhub bilang sudah serahkan semua data mulai dari awal tapi Kemenko Marves mengaku tidak punya data. Jadi terkesannya pemerintah tidak profesional," katanya.

Bambang bisa memaklumi keterlibatan Menko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan ini merupakan hal yang baru pertama kali terjadi. Adapun keterlibatan Menko Marves ini menyusul penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. "Inpres yang harusnya untuk kemudahan usaha, kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan. Kalau mengurusi satu sektor ini saja tidak beres, bagaimana mungkin pemerintah menjalankan Omnibus Law yang melibatkan ribuan regulasi sesuai kebijakan Presiden Jokowi," cetusnya.

Politisi asal Surabaya ini menilai, seharusnya Menko Luhut dan stafnya profesional dan memprioritaskan maritim sebab masalah tarif penyeberangan ini menjadi jeritan para pengusaha di sektor angkutan kapal ini. Gara-gara tarif, banyak dari pelaku usaha angkutan penyeberangan mengalami kritis dan terancam berhenti operasi dalam waktu dekat.

"Menko Luhut semestinya mempercepat penetapan tarif sesuai kebutuhan angkutan penyeberangan, dan bahkan harus menolak usulan Menhub untuk mencicil kenaikan tarif 38 persen dibagi tiga tahap selama 3 tahun karena menyangkut jaminan keselamatan dan kenyamanan transportasi," tegas politisi Gerindra ini. ■ KAL